

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme kerja pendamping desa melalui beberapa tahapan yaitu :

- a) Tahap Perencanaan, meliputi Musrenbangdes, Survey lokasi, dan penyiapan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembangunan
- b) Tahap Pelaksanaan, meliputi: pendampingan dalam proses pengerjaan pembangunan, menyiapkan alat, material, Penyediaan tenaga kerja sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan memonitoring pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa
- c) Tahap pemantauan : pengawasan dan evaluasi secara terperinci dari tahap perencanaan sampai selesai sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan, dan membuat LPJ yang berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan agar sesuai dengan rencana.

Dalam mekanisme kerja, Pendamping lokal desa menemukan beberapa temuan di lapangan khususnya di Desa Hauteas Barat, yaitu kurang adanya aspirasi masyarakat dalam forum rembug desa musdus, musdes dan Musrenbangdes. Kesadaran masyarakat akan pembangunan perlu ditingkatkan karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pemerintahan desa juga ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana desa bersifat transparansi dalam memaksimalkan pembangunan desa.

2. Tantangan yang dihadapi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu;

- a) Minimnya pemahaman dari masyarakat dan pemerintah desa tentang pendampingan.
- b) Kapistas PLD hanya berjumlah 1 (satu) orang untuk mendampingi 4 (empat) desa dan Jarak dari desa ke desa yang lainnya berjauhan dan perlu upaya untuk mengaksesnya hal tersebut.
- c) Kondisi jalan yang buruk karena belum tersentuh aspal karena itu di butuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk bisa menjangkau semua wilayah kerjanya.
- d) Desa Hauteas Barat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam program pembangunan. jika partisipasi rendah maka akan menjadi hambatan untuk memajukan desa.
- e) Honor/gaji bagi PLD nominalnya juga kurang memuaskan dan tidak sebanding dengan beban tugas yang harus diemban.

3. Manfaat adanya pendamping desa di Desa Hauteas Barat yaitu memberi dampak positif bagi desa dalam pembangunan desa, seperti membantu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desamulai dari pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) atau membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan membantu program-program pembangunan dari dana desa.

6.2. SARAN

1. Melihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hauteas Barat, maka perlu adanya peran pemerintah untuk merangsang masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Berikut beberapa cara untuk merangsang masyarakat Desa Hauteas Barat yaitu:

- a) Menjadikan hari jumat sebagai hari jumat bersih.
- b) Dalam setiap program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pemerintah desa harus membuat daftar program pendaftaran pekerja tukang, buruh dan pekerjanya harus dari

masyarakat dalam desa dengan nilai upah sesuai standar masing-masing antara tukang dan buruh.

- c) Pemerintah desa harus mengadakan pelatihan dan sosialisasi dalam hal ini membuat program kelompok tenun ikat bagi ibu-ibu.

2. Pendamping harus melakukan pendekatan sosial, pendekatan yang dilakukan lebih sering berkomunikasi dengan desa dan masyarakatnya sehingga akan terjalin ikatan dan hubungan yang baik.

3. Kualitas SDM perangkat desa perlu ditingkatkan, hal ini perlu adanya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afandi, M.I. dan Warijo.(2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembaguna Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Admosudiharjo, Prajudi. 1987. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Bodgan, Robert dan Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Terjemahan oleh Arief Rurchan, Surabaya: Usaha Nasional.
- Basi, Yswar Zainul dan Subri, Muyadi. 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chambers, R. 1995. *Lembag penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta.
- Chalik, Abdul . Habibullah, Muttaqin. 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*. Yogyakarta: Interpena.
- Friendman, J. 1992. *Empowerment: The politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers. Cambridge, USA.
- Haerul, Akib, H. ,& Hamdan. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2), 2134. Retrieved.
- Iskandar. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga YPAPI. 2003.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kencana, Syafie Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kartasasmita. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta; UPP STIM YKPN.

Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994).

Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

M,Thoha. 2012. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Nogi Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Ramdhani, Abdullah -Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017.

Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.

Siagian, Sondang P.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharto,Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Syamsi, Ibnu.1998. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Karsa.

Soekanto, Soejono.2009: 212-213, *Peranan sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, RajawaliPers, Jakarta.

Tahir, Arifin.2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan pemerintah Daerah*. Bandung : ALFABETA.

Winarn, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Winardi. 1996. *Azas-Azas Marketing*. Bandung, Alumni.

Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Bayumedia.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 ayat 3 Penataan desa.

Undang-Undang Tentang Desa Pasal 79.

from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendamping_lokal_desa&oldid=16337086.

<http://kbbi.web.id/bijak> (Rabu 25 maret 2019,09:34). <http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri.html>, diakses pada Jumat, 27 Maret 2020, pukul 11.51 WIB.

DOKUMENTASI



PANDUAN PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan pemerintah desa dengan adanya Pendamping Lokal Desa(PLD)?(Kepada KepalaDesa, Sekdes dan Bendahara).
2. Apa tanggapan pendamping desa terhadap pembangunan desa? (kepada PDP, PDTI dan PLD).
 - Tahap perencanaan.
 1. Apa saja yang dilakukan dalam tahap perencanaan penyusunan dokumen RPJMDes, RKP, dan APBDes? (kepada Kepdes dan PLD).
 2. Bagaimana peran masyarakat desa dalam kegiatan musrembang desa? (kepada PLD).
 - Tahap pelaksanaan.
 1. Apa saja hal-hal yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pembuatan rencana anggaran biaya(RAB)? (kepada PLD).
 2. Apa saja hal-hal yang diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RAB(rencana anggaran biaya)? (kepada PLD).
 3. Bagaimana tanggapan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa? (kepada Masyarakat 2 (dua) orang).
 - Tahap monitoring/ pemantauan.
 1. Bagaimana peran PLD dalam pengawasan pembangunan desa sehingga berjalan dengan baik? (kepada kepala desa dan PLD).
 2. Bagaimana tanggapan PLD terhadap anggaran dana desa dalam memaksimalkan pembangunan? (kepada PLD).
 3. Bagaimana mekanisme pengawasan, media yang digunakan dalam pengawasan? (kepada PLD).
3. Apa saja tantangan atau hambatan yang dilalui PLD? (kepada PLD).
4. Bagaimana hubungan antara PLD, pemerintah desa, BPD dan masyarakat? (kepada PLD dan kepala desa dan masyarakat 2 (Dua) Orang).
5. Apa manfaat PLD dalam pemerintah desa? (kepada kepala desa dan sekertaris desa).